



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 60 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyajian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 merupakan ringkasan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui pengembangan kapasitas daerah dan agar diketahui oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini bermanfaat dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumedang, 29 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,


Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Ketentuan ini merupakan amanat dari Pasal 23 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RLPPD Kabupaten Sumedang disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022. Dengan terselesainya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhan Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka Mewujudkan **"KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025"**.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. BATAS ADMINISTRASI DAERAH

Kabupaten Sumedang terletak antara 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63"-108°12'59,04" Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270 desa dan 7 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas



permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 1.187.620 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan
Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2022

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WADO	22.942	22.041	44.983
2	JATINUNGGAL	23.466	23.020	46.486
3	DARMARAJA	18.944	18.653	37.597
4	CIBUGEL	12.844	12.330	25.174
5	CISITU	15.664	15.426	31.090
6	SITURAJA	21.732	21.403	43.135
7	CONGGEANG	14.578	14.831	29.409
8	PASEH	19.386	19.345	38.731
9	SURIAN	6.014	5.995	12.009
10	BUAHDUA	16.579	16.898	33.477
11	TANJUNGSARI	43.791	43.140	86.931
12	SUKASARI	17.465	16.916	34.381
13	PAMULIHAN	32.341	31.841	64.182
14	CIMANGGUNG	46.077	44.474	90.551



No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15	JATINANGOR	47.045	45.693	92.738
16	RANCAKALONG	21.089	20.835	41.924
17	SUMEDANG SELATAN	41.322	40.801	82.123
18	SUMEDANG UTARA	51.023	50.246	101.269
19	GANEAS	13.332	13.020	26.352
20	TANJUNGPURA	17.874	17.411	35.285
21	TANJUNGMEDAR	13.434	13.522	26.956
22	CIMALAKA	31.983	31.414	63.397
23	CISARUA	10.755	10.594	21.349
24	TOMO	11.711	11.912	23.623
25	UJUNGJAYA	15.752	16.028	31.780
26	JATIGEDE	11.209	11.479	22.688
	Jumlah	598.352	589.268	1.187.620

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang PDB semester II 2022

Tema Arah Kebijakan RKPD tahun 2022 Kabupaten Sumedang

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 2.1.2
Perubahan Tema Tahun 2022

No	Tema Pembangunan Tahunan (Awal)	Perubahan Tema Pembangunan Tahunan
1	Tema/Fokus Tahun 2022 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kemandirian Daerah	Tema/Fokus Tahun 2022 : Akselerasi Sumedang Simpati Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

Berikut tabel Rincian fokus arah kebijakan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Fokus Arah Kebijakan Tahun 2022

No	Fokus Arah Kebijakan Tahun 2022
1.	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas



	aktivitas perekonomian masyarakat
2.	Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi
3.	Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
4.	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
5.	Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia

No	Fokus Arah Kebijakan Tahun 2022
6.	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan
7.	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
8.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
9.	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik
10.	Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam
11.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan
12.	Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim
13.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima
14.	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah
15.	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional
16.	Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat
17.	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja
18.	Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda
19.	Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif

Sumber : RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro IPM Kabupaten Sumedang dalam 4 tahun terakhir 2022 mampu kembali meningkat cukup tinggi (0,89 poin) hingga mencapai (72,69 poin) dari tahun 2021 sebesar (71,80 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19.



Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang sebelum pandemi Covid-19 sudah mencapai 1 digit dengan rata-rata persentase penurunan sekitar 7% dari capaian tahun sebelumnya. Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan dari 10,71% pada tahun 2021 menjadi 10,14% atau mampu menurun 0,57% pada tahun 2022.

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2022 walaupun masih situasi pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK masih terjadi. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2022 dimana TPT mengalami penurunan, baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih baik dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari penurunan di level nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2021 sebesar 9,18 persen menurun ke 7,72 pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang selama masa pandemi covid 19 mengalami penurunan, namun dengan berjalannya waktu dengan situasi pandemi covid 19 berstatus melandai kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang secara perlahan mengalami peningkatan kearah positif hal tersebut dapat kita lihat dari data BPS Kabupaten Sumedang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 3.17% menjadi sebesar 5,03 % pada tahun 2022.



Pendapatan Per kapita pada tahun 2021 mencapai 32.130 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,464 atau dengan selisih kenaikan sebesar 2.334 .

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan kembali menurun ke 0,359 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali ke angka 0,394.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Makro
Perbandingan Tahun 2021 dan 2022
Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN MAKRO	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,80	72,69
2	Angka Kemiskinan	Persen	10,71	10,14
3	Angka Pengangguran	Persen	9,18	7,72
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,17	5,03
5	Pendapatan Kapita	Per Rebu Rupiah	32.130	34.464
6	Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,359	0,394

III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,



Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan dasar Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,0395
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,462
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	90,269
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	53,468

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2022

2. URUSAN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,06
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,57
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	97,02
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,28
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,90
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	98,45



12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	98,20
-----	---	-------

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	85,64
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai er rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	1
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	68,62
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	75,93
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,98
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,54
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,75
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi	100



masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	
---	--

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani oleh pemerintah	2,737
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,66
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4.84

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2022

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	87600
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	73,864

Sumber : Satpolpp Damkar dan BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022

6. URUSAN SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022



IV. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2022 Terhadap LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021, masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.

B. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.976.931.534.658,00 terealisasi sebesar Rp. 2.742.302.348.926,26 atau 92,12%, dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.180.852.190,00 terealisasi sebesar Rp. 2.508.111.059.375,00 atau 78,85%.

Dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.742.302.348.926,26 diperhitungkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.508.111.059.375,00 dan realisasi pembiayaan



daerah sebesar Rp. 108.604.646.639,61, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah sebesar Rp. 220.009.696.280,90. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2022 dapat melakukan efisiensi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
4.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	2.976.931.534.658,00	2.742.302.348.926,26	92,12
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	531.458.638.880,00	457.051.458.858,26	86,00
4.1.01.	Pajak Daerah	237.977.066.250,00	210.992.206.126,00	88,66
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.129.543.526,00	7.732.139.319,00	47,94
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.638.338.095,00	12.643.497.231,00	100,04
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	264.713.691.009,00	225.683.616.182,26	85,26
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.445.472.895.778,00	2.283.176.104.768,00	93,36
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.844.724.840,00	1.983.393.241.645,00	94,14
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	338.628.170.938,00	299.782.863.123,00	88,53
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	2.074.785.300,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0	2.074.785.300,00	
5.	<u>BELANJA DAERAH</u>	3.180.852.190.097,00	2.508.111.059.375,00	78,85
5.1.	BELANJA OPERASI	2.174.405.964.869,00	1.788.874.414.235,00	82,27
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.236.237.935.089,00	1.103.250.173.080,00	89,24
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	852.462.461.630,00	631.057.827.851,00	74,03
5.1.03.	Belanja Bunga			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5.1.04.	Belanja Subsidi	180.000.000,00		
5.1.05.	Belanja Hibah	78.151.107.250,00	48.500.706.104,00	62,06



5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	7.374.460.900,00	6.065.707.200,00	82,25
5.2.	BELANJA MODAL	559.478.453.307,00	331.035.305.347,00	59,17
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	27.617.607.139,00	10.904.022.000,00	39,48
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.796.306.905,00	131.493.289.117,00	63,89
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.848.591.707,00	97.342.388.261,00	72,19
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	168.281.110.039,00	78.410.364.356,00	46,59
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.339.837.517,00	12.595.648.613,00	56,38
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	595.000.000,00	289.593.000,00	48,67
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	56.399.750.921,00	2.797.269.220,00	4,96
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	56.399.750.921,00	2.797.269.220,00	4,96
5.4.	BELANJA TRANSFER	390.568.021.000,00	385.404.070.573,00	98,68
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	29.487.295.000,00	27.796.484.611,00	94,27
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	361.080.726.000,00	357.607.585.962,00	99,04
	SURPLUS/(DEFISIT)	(203.920.655.439,00)	234.191.289.551,26	(114,84)

V. INOVASI DAERAH

1. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Updating Data/Informasi Tata Ruang (Sistem Informasi Perencanaan Berbasis GIS)

Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengelolaan data berupa kuantitas dan kualitas ketersediaan data yang masih kurang memadai menyebabkan lemahnya Pengendalian dan evaluasi sebagai quality control perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pengolahan dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan tidak lepas akan kebutuhan terhadap data dan informasi, data yang diperlukan tentunya data yang baik yaitu yang memenuhi kriteria :

- a. Objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



- b. Representatif, artinya mewakili (persoalan yang ada) sesuatu yang lebih luas.
- c. Mempunyai (Tingkat) Kesalahan Baku Yang Kecil.
- d. Up To Date, data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa.
- e. Relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Permasalahan yang terjadi saat ini dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut :

- a. Data tidak bisa memberikan informasi yang meyakinkan/tidak valid.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data yang besar

Dengan demikian perlu adanya inovasi dalam rangka pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yaitu dengan membuat perencanaan pembangunan yang berbasis sistem informasi geografis, hal ini agar data tematik terintegrasi dengan ruang wilayah Kabupaten Sumedang.

Manfaat dari inovasi ini dalam perencanaan pembangunan adalah :

- 1) Optimalnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan;
- 2) Optimalnya Sistem Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Memudahkan proses evaluasi sehingga hasil evaluasi capaian target kinerja dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan daerah;
- 4) Memudahkan proses pengambilan keputusan bagi pimpinan;
- 5) Jelasnya calon penerima dan calon lokasi yang menjadi sasaran pembangunan sesuai kebutuhan;
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap,



menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis.

Dalam artian sederhana sistem informasi geografis adalah sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database). SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi.

2. Conversational Government

Conversational Government adalah salah satu platform digital yang mengintegrasikan layanan-layanan masyarakat ke dalam aplikasi percakapan yang telah tersedia dan sering digunakan oleh masyarakat. Melalui aplikasi perpesanan yang terpasang pada smartphone masyarakat dapat berinteraksi langsung untuk memperoleh informasi dan memperoleh layanan dari chatbot.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tengah merancang sebuah Bot Pelayanan Masyarakat Desa melalui aplikasi perpesanan *WhatsApp* pada nomor 081120000999 yang diintegrasikan dengan super aplikasi e-office desa dan tanda tangan digital dari Badan Sertifikasi Elektronik. Pelayanan melalui Chatbot tersebut diantaranya :

1. Surat Pengantar Catatan Kepolisian
2. Surat Keterangan Domisili
3. Surat Keterangan Usaha
4. Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Surat Keterangan Belum Menikah
6. Surat Keterangan Belum Menikah
7. Surat Keterangan Usaha
8. Surat Keterangan Tidak Mampu
9. Surat Keterangan Tidak Mampu (ybs)
10. Surat Keterangan KTP Kadaluarasa



11. Surat Keterangan Beda Nama
12. Surat Keterangan Ahli Waris
13. Surat Keterangan Kehilangan
14. Surat Keterangan Kebakaran
15. Surat Keterangan Tanah / Bangunan
16. Surat Keterangan Serba Guna
17. Surat Keterangan Penghasilan
18. Surat Keterangan Berada di Luar Kota
19. Surat Keterangan Janda / Duda

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa

Penerapan SAKIP Desa, 270 Desa di Kabupaten Sumedang kini sudah berorientasi hasil, sehingga Angka Kemiskinan pada 2022 kembali dapat diturunkan dari 10,71% pada tahun 2021 menjadi 10,14% atau dengan selisih penurunan sebesar 0,57% pada tahun 2022, serta hasil Survei indek Kepuasan Publik semakin meningkat (88,19 poin). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Desa Mandiri : 81; Desa Maju : 141; Desa Berkembang: 42; Desa Tertinggal : 0).

Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem “performance management”), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App e-Office Desa).

Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya, telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020.

D. PENUTUP



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Hasil pembangunan di Kabupaten Sumedang pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Sumedang, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang lainnya.

Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : www.sumedangkab.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat menyampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Demikian RLPPD ini kami sampaikan, semoga Allah Subhana Wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin Ya Allah.

Sumedang, 29 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.

